

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam menekan angka judi online di Kota Lhokseumawe. Hukum jinayat sendiri diartikan sebagai ketentuan pidana dalam ajaran islam yang mengatur tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran (jarimah) beserta jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelakunya, salah satu diantaranya yaitu maisir (judi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari Qanun Jinayat diterapkan kepada masyarakat melalui Satuan Satpol PP dan WH dan mengidentifikasi indikator-indikator yang menjadi penghambat terhadap implementasi Qanun Jinayat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, serta menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, serta dokumentasi terhadap pihak berwenang, hakim, serta masyarakat. Adapun teknik analisis data meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang dijalankan oleh Satuan Satpol PP dan WH belum berjalan secara efektif, dikarenakan masih maraknya praktik judi online di Kota Lhokseumawe. Indikator komunikasi, keterbatasan dalam sumber daya, terutama dalam bidang teknologi, serta sikap pelaksana dari implementor. Dengan demikian, indikator-indikator tersebut yang mempengaruhi implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 terkait fenomena praktik judi online di Kota Lhokseumawe. Diperlukannya koordinasi antara pemangku kebijakan dengan aktor implementasi dikarenakan aktor implementasi yang menjalankan kebijakan, serta peningkatan terhadap sumber daya, terutama dalam bidang ekonomi dikarenakan situs judi online makin bertambah setiap harinya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Qanun Jinayat, Judi Online

ABSTRAK

This study examines the implementation of Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Lawa in reducing the rate of online gambling in Lhokseumawe City. Jinayat Law itself is defined as criminal provisions in Islamic teachings that regulate actions categorized as violations (jarimah), along with the types of punishments imposed on the perpetrators, one of which is maisir (gambling). This study aims to determine the extent to which the Jinayat Qanun has been Implemented within the community through the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and Wilayatul Hisbah (WH), and to identify the indicators that hinder the implementation of the Jinayat Qanun. The research method used is a qualitative approach with a descriptive, employing the theory of Van Meter and Van Horn, as well as data collection techniques such as observations, interviews, and documentation involving authorities, judges, and the public. The data analysis techniques used in this study consisted of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the implementation of Qanun Number 6 of 2014 carried out by the Satpoll PP and Wh has not been effective, as evidenced by the widespread practice of online gambling in Lhokseumawe City. The inhibiting factors include public issues, limitations in resources, especially in the field of technology, and the attitudes of the implementers. thus, these indicators influence the implementation of Qanun Number 6 of 2014 regarding the phenomenon of online gambling practices in Lhokseumawe City. Therefore, considering that the implementers are responsible for executing the policy. In addition, improvements in resources, particularly in the economic sector are needed, as online gambling sites continue to increase every day.

Keywords: Policy implementation, Qanun Jinayat, Online Gambling